

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Isu lingkungan hidup jadi hal yang kerap kali dibicarakan di kancah global setelah peristiwa perang dingin. Sejumlah negara kemudian menyadari pentingnya lingkungan yang sehat bagi keberlangsungan hidup umat manusia. Seiring dengan peningkatan kesadaran tentang lingkungan dimana hal ini sungguh memengaruhi kehidupan masyarakat sehari-hari, maka isu lingkungan menjadi persoalan yang diangkat didalam agenda internasional.¹

Isu lingkungan mulai jadi isu yang krusial guna dilakuka pengkajian dalam studi hubungan internasional, sebab hal ini dipengaruhi oleh perilaku dan aktifitas manusia dalam kurun waktu yang lama dan tent berpengaruh terhadap keadaan bumi. Aktifitas manusia mengakibatkan permasalahan ekologis seperti halnya pemanasan global, perubahan iklim global, menipisnya lapisan ozon bumi, peningkatan polusi yang dimana hal ini kembali menjadi ancaman bagi manusia itu sendiri. Melihat dari sejarah perkembangan manusia yaitu ialah revolusi industri. Revolusi industri terjadi pada tahun 1784 dan telah mendorong beberapa perubahan seperti perkembangan teknologi pada bidang industry, serta memberikan pengaruh yang begitu besar pada kehidupan sosial ekonomi manusia.²

Perubahan kehidupan ekonomi sosial masyarakat tersebut tentu

¹ Haykal, M. H. (2022). "Revolusi industri dalam ruang lingkup lingkungan internasional". *REVOLUSI INDUSTRI DALAM RUANG LINGKUP LINGKUNGAN INTERNASIONAL*.

² ibid

menyebabkan degradasi terhadap lingkungan hidup, tetapi pada saat ini masalah lingkungan belum begitu menjadi isu penting sebab masih dikategorikan sebagai isu lokal.³

Pada tahun 1960an mulai terlihat awal dari krisis lingkungan hidup, peristiwa ini dapat disebut sebagai “Modern Ecological Crisis” sebab permasalahan krisis lingkungan hidup mulai mengalami peningkatan dengan dampak yang semakin luas dengan skala yang lebih besar, serta timbul bentuk kepedulian pada masalah lingkungan hidup diseluruh dunia. Pada masa ini juga mulai muncul gerakan sosial masyarakat yang turut merespon mengenai krisis lingkungan hidup yang terjadi akibat perang dunia dua, sebagaimana yang telah diketahui ekosistem alam telah rusak dan kehidupan manusia terancam.⁴

Beberapa upaya dalam membangun lingkungan sehat ialah dengan Sanitasi, hal ini merupakan cara menjaga kelestarian lingkungan dari makhluk hidup yang hidup di dalamnya. Berikut usaha sanitasi pada masyarakat mencakup pemenuhan akses air bersih, saluran pembuangan limbah, pengelolaan sampah, serta jamban yang sehat. Maka dari itu, sanitasi tentu berdampak guna kesehatan berdasarkan Departemen Kesehatan RI. Sanitasi lingkungan ialah keadaan lingkungan optimum dengan demikian kemudian akan memberikan pengaruh baik pada status kesehatan yang optimal.⁵ Sanitasi lingkungan memprioritaskan penanganan pada suatu faktor lingkungan yang mengakibatkan dampak negatif layaknya penyakit yang bisa

³ Lailia, A. N. (2014). “*Gerakan masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS AIRLANGGA)”.

⁴ Turangan, F. D. (2022). “*Peran April Group dalam Program Restorasi Hutan di Provinsi Riau Pasca Kebakaran Hutan Tahun 2019* (Doctoral dissertation)”.

⁵ Khairunnisa, K., Jiwandono, I. S., Nurhasanah, N., Dewi, N. K., Saputra, H. H., & Wati, T. L. (2019). “Kampanye Kebersihan Lingkungan melalui Program Kerja Bakti Membangun Desa di Lombok Utara”. *Jurnal Pendidikan Dan Pengabdian Masyarakat*, 2(2).

dihindari. Akan tetapi, penyediaan sarana sanitasi di Indonesia belum begitu memadai dan minimnya perubahan oleh masyarakat. Perihal ini dapat diamati bagaimana masih terdapat masyarakat yang belum mempunyai fasilitas sanitasi di rumah yang selaras dengan segala syarat standar yang dilakukan penerapan oleh pemerintahan.⁶ Dalam hal ini upaya perlindungan kebersihan lingkungan dapat dilakukan melalui kerjasama dengan tujuan yang ditargetkan, seperti halnya Pemerintahan Kabupaten Malang dengan USAID.

PP RI No. 66 Tahun 2014 mengenai kesehatan lingkungan, Pasal 31 mengungkapkan penyehatan diterapkan pada media lingkungan layaknya air, tanah, udara, pangan serta sarana serta bangunan. Peraturan ini mempunyai tujuan guna mencapai mutu lingkungan yang jauh lebih baik dari sisi kimia, fisik, sosial maupun biologi. Sehingga setiap orang memiliki kesempatan guna mendapatkan derajat kesehatan yang tinggi. Dengan itu hadirnya penyehatan lingkungan harus dimulai dari masyarakat lebih dulu.⁷

Kegiatan sanitasi lingkungan dan peningkatan air bersih sangat perlu ditujukan agar mendapatkan kualitas lingkungan yang baik untuk makhluk hidup didalamnya, sebab lingkungan sehat mempengaruhi kesehatan masyarakatnya. Kegiatan ini merujuk kepada keputusan Menkes No. 1529/Menkes/SK/X/2010 mengenai Panduan Umum Pengembangan Desa serta Kelurahan Siaga Aktif ialah: promosi mengenai keutamaan sanitasi dasar terhadap masyarakat desa, bantuan dalam penyediaan sarana sanitasi mencakupi peningkatan air bersih, pembuangan

⁶ Rofiana, V. (2015). "Implementasi Kebijakan Program Pamsimas (Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat)". *The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA)*, 1(2), 81-114.

⁷ Celesta, A. G., & Fitriyah, N. (2019). "Gambaran Sanitasi Dasar Di Desa Payaman, Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016". *Jurnal Kesehatan Lingkungan*, 11(2), 83-90.

sampah, serta jamban.⁸

Krusialnya usaha sanitasi lingkungan dan peningkatan air bersih serta jamban keluarga demi kebutuhan guna kesehatan dan banyaknya pengelolaan sumber daya alam oleh masyarakat. Aktiitas BAB masih realtif banyak dilaksanakan masyarakat di sungai sekitaran rumah, tak sekedar itu masyarakat juga melakukan cuci pakaian mereka di sungai. Aktivitas ini kemudian menjadi sesuatu yang memerlukan perhatian khusus. Pada sisi lain, kualitas air juga masih menjadi masalah bagi masyarakat, melihat air merupakan sumber kehidupan manusia dan sumber daya alam yang dikelola. Kebutuhan masyarakat mengenai air bersih menekankan bahwa pengawasan air perlu ditangani demi mencegah pencemaran sumber air bersih. Air sangat penting bagi manusia serta unsur utama terhadap wilayah yang mempunyai relatif banyak potensi SDA.

Kabupaten Malang menjadi satu diantara Kabupaten di Indonesia yang letaknya berada di Prov. Jawa Timur (Jatim) memiliki luas wilayah 3.534,86 km² serta memiliki total jumlah penduduk 2.446.218 jiwa pada tahun 2010.⁹ Kabupaten Malang dikenal dengan wilayah yang sangat kaya akan potensi, beberapa antara lain seperti tanaman obat, perkebunan, pertanian dan lain sebagainya. Selain itu, Kabupaten Malang kemudian dikenal dengan banyaknya obyek wisata yang sangat menarik. Kab. Malang berbatasan dengan Kota Malang serta Kota batu yang berada tepat di tengah-tengahnya. Pada bagian timur merupakan wilayah dengan banyak pegunungan, seperti pegunungan

⁸ Annisa, C., & Susilawati, S. (2022). "Gambaran Sanitasi Lingkungan Terhadap Sarana Air Bersih dan Jamban Keluarga di Kelurahan Sukaraja". *PubHealth Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 1(1), 85-90.

⁹ Fadhillah, D. A. F., Faisol, A., & Vendyansyah, N. (2022). "Penerapan Metode K-Means Clustering Pada Pemetaan Lahan Kopi Di Kabupaten Malang". *JATI (Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika)*, 6(1), 162-170.

Semeru-Tengger-Bromo, dengan mencapai ketinggian 3.676 km pada Gunung Semeru serta 2.392 km pada Gunung Bromo. Gunung Semeru menjadi gunung paling tinggi di Jawa, menariknya kota Malang terletak di cekungan antar kedua wilayah pegunungan terkait. Pada sisi selatan terdapat dataran bergelombang serta pegunungan.

Di samping itu, Kabupaten Malang mempunyai potensi pertanian di dibawah iklim sejuk. Kemudian melihat pada daerah timur serta utara cukup banyak dijadikan perkebunan apel, berbeda dengan daerah pegunungan di barat lebih banyak sayuran serta berhasil jadi satu diantara penghasil sayuran inti dengan kualitas baik di Jatim. Wilayah selatan umumnya dilakukan penanaman dengan hortikultura serta tebu, layaknya semangka serta salak. Kab. Malang serta mempunyai beberapa perkebunan, beberapa diantaranya seperti perkebunan teh, kopi, dan coklat. Pada bagian Selatan tepatnya di pegunungan kabur banyak terdapat hutan jati dengan kualitas yang bagus. yang Melihat banyaknya pegunungan yang ada di wilayah Kabupaten Malang, tentu terdapat juga mata air sungai dan wilayah perairan, tepatnya di puncak Gunung Arjuno pada bagian barat dan barat laut, sungai tersebut menjadi sungai terpanjang di Jawa Timur.¹⁰

Dengan banyaknya potensi baik yang dimiliki Kabupaten Malang, tentu hal ini tidak terlepas dari air sebagai hal utama dalam berkembangnya potensi-potensi tersebut. Air jadi satu diantara perihal yang relatif krusial guna mendapatkan perhatian lebih. Dalam hal ini, Kabupaten Malang sempat mengalami krisis air bersih serta ketersediaan air yang menipis di 6 desa. Dari

¹⁰ Lathif, S., & Raharjanto, A. (2021). "Kondisi Vegetasi dan Strategi Rehabilitasi Pasca Kebakaran Hutan Hulu Das Gumandar Gunung Arjuna, Jawa Timur".

sana bantuan datang dari BPBD dengan melaksanakan dropping air bersih ke sejumlah desa, dengan mengirimkan sekitar 1.481.000 liter air.¹¹ Dari permasalahan ini dapat dilihat bagaimana pengaruh yang dapat dihasilkan apabila air sebagai unsur penting dalam kehidupan terganggu, hal tersebut dapat berdampak pada kerugian ekonomi yang berupa hilangnya penghasilan dikarenakan kematian dini, penurunan produktivitas akibat sakit, serta biaya layanan.¹²

Ketersediaan air di Kabupaten Malang begitu cukup dan memiliki potensi yang besar, namun sangat disayangkan air di Kabupaten Malang memiliki kualitas yang kurang baik. Dengan ini, pemerintahan Kabupaten Malang berupaya untuk mengatasi hal ini melalui kerjasama dengan USAID. Setelah menelaah masalah serta potensi yang dimiliki Kabupaten Malang, USAID memilih Kabupaten Malang untuk terlibat dalam kerjasama demi peningkatan air bersih dan sanitasi, perihal ini diberikan dukungan dengan SDM yang mencukupi serta pola pikir masyarakat yang terbuka.

Undang-undang otonomi daerah dengan terkhusus melakukan pembahasan tentang otonomi daerah memberi kesempatan atau keleluasaan pada daerah dalam melaksanakan aktivitas politik luar negeri pada tingkat sub state. UU No. 23 tahun 2014 pasal 1 ayat 6, otonomi daerah ialah wewenang, hak, serta kewajiban daerah otonom dalam mengelola serta menata kepentingan

¹¹ Faruq, D. U. Al. (2023). "Kabupaten Malang Alami Kekeringan, BPBD Salurkan 2,1 Juta Air Bersih ke Warga Terdampak. Medcom". <https://www.medcom.id/nasional/daerah/3NO1IZmk-kabupaten-malang-alami-kekeringan-bpbd-salurkan-2-1-juta-air-bersih-ke-warga-terdampak>

¹² Qipra Galang Kualita. (2015). "Ternyata Bisa Cerita Pembangunan Air Minum dan Sanitasi Indonesia". Jakarta: Sekretariat Kelompok Kerja AMPL.

pemerintah dan masyarakat NKRI.¹³ Kondisi arus politik saat ini serta pengaruh globalisasi mengakibatkan pemerintah daerah cenderung untuk melakukan kerjasama luar negeri.¹⁴ Kegiatan paradiplomasi menjadi langkah yang strategis demi memajukan suatu daerah.¹⁵ Oleh sebab itu, makna utama daerah otonom dalam kajian studi hubungan internasional tak bisa dikesampingkan sebab melihat yakni dengan relatif mandiri daerah otonom mampu melaksanakan aktivitas hubungan internasional dengan cara langsung bersama dengan pihak luar negeri, baik dengan sifat antar pemerintahan ataupun kerjasama dengan non pemerintahan asing.¹⁶ Namun, perlu ditekankan bahwa pemerintahan daerah perlu berkoordinasi dengan pemerintah pusat sebab pemerintahan daerah tidak memiliki keadulatan penuh, garis yurisdiksinya terbatas secara lokal, dan secara hierarki berada di bawah pemerintahan pusat.

Melihat bagaimana potensi dari aktivitas paradiplomasi membawa peran dan manfaat penting, aktivitas politik ini perlu dilakukan oleh kawasan yang memiliki banyak potensi yang dapat dikerjasamakan demi menunjang efektivitas kerjasama luar negeri. Seperti halnya Kabupaten Malang yang paradiplomasi. Melihat aktivitas paradiplomasi menjadi hal yang cukup membawa dampak yang baik dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat dan meningkatkan profil pemerintahan daerah jauh lebih baik.

¹³ Wijayanti, S. N. (2016). "Hubungan antara pusat dan daerah dalam negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014". *Jurnal Media Hukum*, 23(2), 186-199.

¹⁴ Aldecoa, F., & Keating, M. (2013). *Paradiplomacy in action: the foreign relations of subnational governments*. Routledge.

¹⁵ Pujayanti, A. (2018). "Peran daerah dalam diplomasi ekonomi. *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri dan Hubungan Internasional*", 7(1).

¹⁶ Mukti, T. A. (2015). "Paradiplomacy: bangkitnya aktor lokal di fora internasional". *The POLITICS: Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin*, 1(1), 85-94.

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian yang telah ditemukan dalam latar belakang di atas maka penelitian ini mengambil rumusan masalah penelitian yaitu : **“Bagaimana efektivitas paradiplomasi Pemerintah Kabupaten Malang dalam pembangunan air bersih dan sanitasi melalui kerja sama dengan USAID?”**.

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

1. Menguraikan permasalahan lingkungan serta ketersediaan air bersih di Kabupaten Malang.
2. Memaparkan upaya paradiplomasi Kabupaten Malang dalam pembangunan sanitasi dan air bersih melalui kerja sama dengan USAID.
3. Menjelaskan efektivitas paradiplomasi Kabupaten Malang bersama USAID dengan menganalisa dampak dari program-program yang diimplementasikan dalam pembangunan sanitasi dan air bersih di Kabupaten Malang.

1.3.2 Manfaat Penelitian

1.3.2.1 Manfaat Akademi

Penulis dalam penelitian ini berharap dapat memberikan manfaat secara akademis untuk dapat menambah wawasan baru serta pengetahuan, dapat menjadi inspirasi untuk penelitian selanjutnya. Hasil penelitian ini kemudian

diharapkan mampu memberikan referens dalam perkembangan keilmuan dalam isu hubungan internasional yang memiliki fokus paradiplomasi, kerja sama luar negeri, dan pemenuhan kebutuhan masyarakat di Indonesia tepatnya pada tingkat administrasi dibawah pemerintahan pusat atau provinsi.

1.3.2.2 Manfaat Praktis

Penulis berharap penelitian ini mampu meningkatkan pemahaman untuk penulis sendiri dan khalayak umum yang juga ingin memahami perihal paradiplomasi. Melihat aktivitas paradiplomasi menjadi hal yang cukup membawa dampak yang baik dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat dan meningkatkan profil pemerintahan daerah jauh lebih baik.

1.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian pertama dilakukan oleh **Farah Dila Puspitasarie, Mohamad Rosyidin S.Sos.,M.A, Muhammad Faizal Alfian, S.IP.,M.A** dengan judul **“Kerjasama Sister City Pemerintah Kota Surabaya dan Kitakyushu Sebagai Bagian dari Paradiplomasi Efektivitas Program Itac Dalam Kerjasama Sister Province Provinsi Jawa Tengah Dengan Queensland Tahun 2019-2021”**¹⁷ menjelaskan mengenai rendahnya standar mutu pendidikan di Jawa Tengah serta tenaga kependidikan, hal ini menimbulkan inisiasi ITAC (International Training and Assessment Course) atas program

¹⁷ Puspitasarie, F. D., Rosyidin, M., & Alfian, M. F. (2022). “Efektivitas Program ITAC dalam Kerjasama Sister Province Provinsi Jawa Tengah dengan Queensland Tahun 2019-2021”. *Journal of International Relations*, 8(4), 910-921.

pelatihan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan kejuruan Queensland. Hasil yang diperoleh dari penelitian tersebut telah ditemukan bahwa aktivitas paradiplomasi yang dilakukan oleh Pemda didalam penelitian ini ialah sister province namun tidak ada blue print sebab kerjasama tersebut menggunakan kerjasama pusat dan sekedar bernaung dibawah payung sister province yang kemudian diturunkan jadi kerjasama teknis departemen pendidikan Queensland dan Dinas pendidikan dan kebudayaan di Prov. Jawa Tengah. Perbedaan hasil penelitian sebelumnya dengan peneliti saat ini ialah kajian yang diteliti memiliki konsep kerja sama yang berbeda dimana USAID menghibahkan bantuan dalam bentuk kerjasama dalam pengembangan air bersih dan sanitasi dengan pemanfaatan potensi sumber air di Kabupaten Malang, dengan tanpa adanya timbal balik yang didapatkan oleh pihak USAID.

Penelitian kedua dilakukan oleh Harits Dwi Wiratma dan Seftina Kuswardini dengan judul penelitian “Efektivitas Paradiplomasi Sister City Terhadap Pariwisata Halal Nusa Tenggara Barat”¹⁸ menjelaskan mengenai efektivitas paradiplomasi pada sektor pariwisata halal di pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Barat yang merujuk pada potensi besar yang dihasilkan mengingat SDA di Nusa Tenggara Barat begitu kaya, hal ini menjadi modal dasar untuk kemudian menguatkan dan menumbuhkan perekonomian serta citra Indonesia. Hasil yang diperoleh pada penelitian tersebut yaitu Pemerintahan Nusa Tenggara Barat

¹⁸ Wiratma, H. D., & Kuswardini, S. “Efektivitas Paradiplomasi Sister City Terhadap Pariwisata Halal Nusa Tenggara Barat”.

melakukan rencana pembangunan serta sosialisasi dalam melestarikan wisata halal ini, namun memang belum terlihat proses yang signifikan. Perbedaan penelitian yang dilakukan peneliti saat ini, pada kajian yang penulis teliti Kabupaten Malang telah melaksanakan kerjasama bersama USAID, dalam konteks ini telah ada partner kerja sama tersebut, sedangkan pada penelitian sebelumnya penulis hanya memaparkan potensi apabila Nusa Tenggara Barat melakukan paradiplomasi dengan SDM yang ada.

Penelitian ketiga dilakukan oleh Rizqi Apriani dengan judul penelitian “Keefektivitas Tata Kelola Paradiplomasi Di Lingkungan Free Trade Zone (Ftz) Batam”¹⁹ menjelaskan bagaimana Batam menjadi daerah yang cocok sebagai wilayah penanaman modal asing bagi investor asing, sebab Batam bersebelah langsung dengan Malaysia serta Singapura, sebagai jalur pelayaran Internasional. Pada perihal ini, terdapat PP No. 5 Tahun 2011 perubahan atas PP No. 46 Tahun 2007 perihal kawasan bebas serta pelabuhan bebas batam dalam FTZ. Dalam pelaksanaan kebijakan ini masih ditemukannya ketidaksesuaian dalam pelaksanaan paradiplomasi di perbatasan. Perbedaan penelitian yang dilakukan peneliti saat ini, pada kajian yang penulis teliti aktivitas paradiplomasi telah menjadi aktivitas yang kerap kali dilakukan dengan hasil yang baik seperti halnya Kabupaten Malang dengan USAID pada fokus yang peneliti kaji, sehingga pengukuran efektivitas relatif meningkat, tanpa adanya keraguan dari pemerintah pusat. Konsep yang digunakan sama, yaitu

¹⁹ Rizqi Ariani Putri. (2019). “KEEFEKTIVITAS TATA KELOLA PARADIPLOMASI DI LINGKUNGANFREE TRADE ZONE (FTZ) BATAM”. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

konsep paradiplomasi dan efektivitas.

Penelitian keempat dilakukan oleh **Putri Aini Zahra** dengan judul **“Efektivitas Kerjasama Pemerintah Inter Sub-Nasional: Tinjauan Sister State-Province Australia Barat Dan Jawa Timur Tahun 1990-2017”**²⁰

menjelaskan keefektifan kerjasama sister state-province antar Jawa Timur dengan Australia Barat. Dalam penelitiannya, penulis menggunakan konsep efektivitas kerjasama melalui dua faktor yaitu tercapainya tujuan yang disepakati dan elemen kesuksesan paradiplomasi. Kerjasama ini kemudian dikatakan efektif sebab berhasil meraih tujuannya yaitu untuk mempromosikan kerjasama yang aktif yang dapat membawa keuntungan bagi masyarakat Jawa Timur dan Australia Barat, peningkatan SDA, peningkatan aliran barang dan jasa serta pertukaran manusia. Perbedaan penelitian yang dilakukan saat ini, pada kajian yang penulis teliti dengan focus wilayah Kabupaten Malang, kerjasama yang dilakukan memiliki titik fokus pada isu lingkungan yaitu mengatasi kualitas air yang rendah untuk menjaga kestabilan SDA yang sebelumnya memang sudah mumpuni. Kerjasama juga dilakukan antar substate dengan NGO, sehingga terdapat perbedaan proses, walaupun dengan konsep yang sama.

Penelitian kelima dilakukan oleh **Hasri Maghfirotn** dengan judul **“Efektivitas Implementasi Kerja Sama Sister City Kota Surabaya Dan Kota Xiamen Pada Sektor UMKM (Usaha Kecil, Mikro, Dan Menengah) Tahun Pemerintahan Daerah Tulungagung dan United Nations Children’s Fund**

²⁰ ZAHRA, P. A. (2017). *“EFEKTIVITAS KERJASAMA PEMERINTAH INTER SUB-NASIONAL: TINJAUAN SISTER STATE-PROVINCE AUSTRALIA BARAT DAN JAWA TIMUR TAHUN 1990-2017”* (Doctoral dissertation, Universitas Airlangga).

(UNICEF) dalam Menangani Permasalahan Sosial Anak”²¹ Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung melakukan interaksi paradiplomasi politik dengan UNICEF untuk mengatasi permasalahan sosial anak di daerah tersebut. Kerja sama ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anak dan perempuan. Pemerintah Daerah Tulungagung bekerjasama dengan UNICEF melaksanakan banyak proyek, antara lain pembentukan ULT PSAI dan inovasi pengembangan KLA atau Kabupaten Layak Anak. Program ini menunjukkan kemajuan yang signifikan, hal ini terlihat dari prestasi yang diraih oleh Pemerintah Kabupaten Tulungagung sebagai PKSAL.

Penelitian keenam dilakukan oleh **Auva Zaina Wandira** dengan judul **“Efektivitas Kerjasama Sister City Seoul Dan Bandung Dalam Mengembangkan Smart City Di Bandung Tahun 2018-2021”²²** menjelaskan bagaimana kerjasama antara Bandung dan Seoul memberi dampak yang positif apabila dilihat bagaimana Bandung dapat mengelola tata kota dengan jauh lebih baik, terciptanya pasar dengan produk bernilai tinggi, serta membawa Bandung menuju smart city. Alasan kerjasama ini terjalin sebab Soul berhasil mengatasi kawasan kumuh serta penataan kota dengan kawasan terbuka hijau. Dengan banyaknya hal positif yang dihasilkan, kerjasama ini dikatakan efektif. Perbedaan penelitian ini dengan yang penulis kaji ialah terletak pada konsep kerjasama yang dijalin, peneliti membahas kerjasama antara NGO dan substate, dalam hal ini ialah USAID dan Kabupaten Malang. Sehingga tahapan kerjasama

²¹ More, A. A., & Kurniawati, D. E. (2022). “Analisis Paradiplomasi dalam Kerja Sama Pemerintah Daerah Tulungagung dan United Nations Children’s Fund (UNICEF) dalam Menangani Permasalahan Sosial Anak”. *Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton*, 8(2), 407-420.

²² Auva Zaina Andira. (2022). Efektivitas Kerjasama Sister City Seoul Dan Bandung Dalam Mengembangkan Smart City Di Bandung Tahun 2018-2021. Universitas Sriwijaya.

yang dilakukan juga berbeda.

Penelitian ketujuh dilakukan oleh **Ignatius Hubert dan Windy Dermawan** dengan judul **“Paradiplomasi Pemerintahan Jakarta Barat terhadap Publik Global dalam Isu Pengungsi di Kalideres”**²³ menjelaskan upaya yang dilakukan Pemerintahan Pusat terhadap fenomena pengungsi internasional tepatnya di Jakarta Barat. Jakarta Barat merupakan salah satu Kota Administratif yang tepatnya berada di DKI Jakarta. Dalam mengatasi hal ini, Pemerintah Pusat bermitra dengan UNHCR sebagai aktor IGO transnasional dalam membantu pengungsi-pengungsi yang berada di Jakarta Barat. Dalam hal ini, setelah bermitra dengan Pemerintahan Pusat, pendampingan dan bantuan dari UNHCR turun ke wilayah Jakarta Barat menjadi wilayah sasaran atau wilayah tempat pengungsi internasional tersebut berada. Dalam hal ini Pemerintahan Jakarta Barat memberikan sudut pandangnya melalui koordinasi dengan Pemprov DKI Jakarta. Pemerintahan Jakarta Barat menjadi aktor yang turut ikut serta secara langsung berinteraksi kepada pengungsi.

Penelitian kedelapan oleh **Aurora Aziza More dan Dyah Estu Kurniawati** dengan judul **“Analisis Paradiplomasi dalam Kerja Sama Pemerintahan Daerah Tulungagung dan United Nations Children’s Fund (UNICEF) dalam Menangani Permasalahan Sosial Anak”**²⁴ menjelaskan adanya permasalahan sosial anak tepatnya di Kabupaten Tulungagung, dengan

²³ Hubert, I., & Dermawan, W. Paradiplomasi Pemerintah Jakarta Barat terhadap Publik Global dalam Isu Pengungsi di Kalideres.

²⁴ More, A. A., & Kurniawati, D. E. (2022). Analisis Paradiplomasi dalam Kerja Sama Pemerintah Daerah Tulungagung dan United Nations Children’s Fund (UNICEF) dalam Menangani Permasalahan Sosial Anak. *Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton*, 8(2), 407-420.

kerja sama dalam bentuk interkasi politik paradiplomasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung dengan UNICEF diharapkan mampus mendorong kesejahteraan anak dan perempuan. Dalam kerja sama yang dilakukan Pemerintahan Daerah Tulungagung dengan UNICEF ditemukan beberapa program layaknya pembentukan Unit Layanan Terpadu Perlindungan Sosial anak Intefratif (ULT. PSAI) juga inovasi pengembangan KLA atau Kabupaten Layak Anak. Program ini menunjukkan progress psitif, hal ini dilihat dengan prestasi yang berhasil diraih oleh Pemerintahan Kabupaten Tulungagung sebagai Pilot Project Pusat Program Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif (PKSAI).

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

NO	Judul dan Penulis	Jenis Penelitian dan landasan konseptual	Hasil Penelitian
1	Farah Dila Puspitasarie, Mohamad Rosyidin S.Sos.,M.A, Muhammad Faizal Alfian, S.IP.,M.A “Kerjasama Sister City Pemerintah Kota	Jenis Penelitian : Deskriptif Kualitatif Landasan Konseptual: Teori Paradiplomasi	Rendahnya kualitas pendidikan di Jawa Tengah dan tenaga pendidik, hal ini menjadikan ITAC (International Training and Assessment Course) berinisiatif untuk melakukan kerjasama

	<p>Surabaya dan Kitakyushu Sebagai Bagian dari Paradiplomasi Efektivitas Program Itac Dalam Kerjasama Sister Province Provinsi Jawa Tengah Dengan Queensland Tahun 2019-2021”</p>		<p>dengan program pelatihan dari kejuruan Queensland. Ditemukan bahwa kegiatan paradiplomasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah didalam penelitian ini ialah sister province namun tidak terdapat blue print sebab kerjasama tersebut menggunakan kerjasama pusat dan hanya bernaung dibawah payung sister province yang kemudian ditelorkan menjadi kerjasama teknis departemen pendidikan Queensland dan Dinas pendidikan dan kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.</p>
2	<p>Harits Dwi Wiratma dan Seftina Kuswardini “Efektivitas Paradiplomasi Sister City Terhadap</p>	<p>Jenis Penelitian: Deskriptif Kualitatif</p> <p>Landasan Konseptual: Konsep paradiplomasi dan konsep efektivitas</p>	<p>Dengan SDA yang melimpah, Nusa Tenggara Barat perlu melakukan kerjasama dalam pembangunan ekonomi daerah. NTT</p>

	Pariwisata Halal Nusa Tenggara Barat”		kemudian menyikapi hal ini dengan melakukan aktivitas paradiplomasi dengan melakukan rencana pembangunan serta sosialisasi dalam melestarikan wisata halal ini, namun memang belum terlihat proses yang signifikan.
3	Rizqi Apriani “Keefektivitas Tata Kelola Paradiplomasi Di Lingkungan Free Trade Zone (Ftz) Batam”	Jenis Penelitian: Deskriptif Kualitatif- <i>library research-coding method</i> Landasan Konseptual: teori efektivitas, teori Liberalisme, konsep Paradiplomasi	Batam menjadi wilayah yang cocok untuk dijadikan penanaman modal asing sbeab Batam berada dekat dengan Malaysia dan Singapura sehingga menjadi jalur pelayaran internasional. Kemudian muncul kebijakan Free Trade Zone (FTZ) yang diiringi dengan ketidaksesuain aktivitasi paradiplomasi di perbatasan.
4	Putri Aini Zahra “Efektivitas Kerjasama Pemerintah Inter Sub-Nasional: Tinjauan Sister	Jenis Penelitian: Deskriptif Kualitatif Landasan Konseptual: konsep efektivitas	Kerjasama yang dilakukan Jawa Timur dengan Australia Barat dikatakan efektif sebab berhasil mencapai

	State-Province Australia Barat Dan Jawa Timur Tahun 1990-2017”	kerjasama melalui dua faktor yaitu tercapainya tujuan yang disepakati dan elemen kesuksesan paradiplomasi.	tujuan utama, yaitu dengan mempromosikan bentuk kerjasama yang aktif dengan keuntungan bagi masyarakat Australia Barat dan Jawa Timur, peningkatan aktivitas perdagangan, peningkatan kualitas SDA, dan berjalannya komunikasi yang rutin.
5	Hasri Maghfirotin “Efektivitas Implementasi Kerja Sama Sister City Kota Surabaya Dan Kota Xiamen Pada Sektor UMKM (Usaha Kecil, Mikro, Dan Menengah) Tahun 2011-2020”	Jenis Penelitian: Deskriptif Kualitatif Landasan Konseptual: konsep paradiplomansi dan sister city serta sektor UMKM sebagai landasan teori dalam membantu menjawab rumusan masalah.	Surabaya menjadi kota dengan kegiatan UMKM paling banyak pada tahun 2003-2004. Sementara kota Xiamen memiliki fasilitas dalam pengembangan ekonomi UMKM dengan cara pameran yang melibatkan investor asing. Keduanya bekerjasama hingga tahun 2020. Beberapa hambatan muncul, seperti salah satunya kurangnya sumber daya manusia. Namun kerjasama ini dikatakan efektif setelah

			melakukan kerja sama dari tahun 2011-2020 sebab keduanya berhasil meraih indikatif efektivitas, hasil, nyata, pendanaan dan lain sebagainya.
6	Auva Zaina Wandira (2021) “Efektivitas Kerjasama Sister City Seoul Dan Bandung Dalam Mengembangkan Smart City Di Bandung Tahun 2018-2021”	Jenis Penelitian: Deskriptif Kualitatif Landasan Konseptual: Konsep sister city dan konsep paradiplomasi	Kerjasama yang dilakukan antara Seoul dan Bandung membawa banyak dampak positif. Kerjasama ini bernilai positif sebab berhasil menghasilkan perubahan perilaku kota Bandung menuju smart city, serta membantu kota bandung dalam tata kelola kota yang jauh lebih baik, selain itu adanya pembangunan Little Bandung berdampak bagi terciptanya pasar produk. Dengan banyaknya dampak positif yang dihasilkan dari kerja sama ini, aktivitas paradiplomasi yang dilakukan antar Bandung dan Seoul

			dapat dikatakan efektif.
7	Ignatius Hubert dan Windy Dermawan “Paradiplomasi Pemerintahan Jakarta Barat terhadap Publik Global dalam Isu Pengungsi di Kalideres”	Jenis Penelitian: Deskriptif Kualitatif Landasan Konseptual: Paradiplomasi	Keberadaan pengungsi Internasional di wilayah Jakarta Barat menjadi tantangan lokal. Pemerintahan Pusat turut serta dalam menangani fenomena ini, dengan bekerja sama bersama UNHCR, dalam hal ini UNHCR didamping oleh Pemerintah Jakarta Barat dalam mengkoordinasi penyaluran tingkat nasional dan daerah.
8	Aurora Aziza More dan Dyah Estu Kurniawati “Analisis Paradiplomasi dalam Kerja Sama Pemerintahan Daerah Tulungagung dan United Nations Children’s Fund (UNICEF) dalam Menangani Permasalahan Sosial Anak”	Jenis Penelitian : Deskriptif Kualitatif	Munculnya permasalahan sosial anak menggerakkan Pemerintahan Daerah Tulungagung untuk bekerjasama dengan UNICEF, dalam hal ini diharapkan kerja sama ini membantu untuk menekan permasalahan sosial anak serta mendorong pembangunan lokal

			yang memiliki fokus terhadap generasi bangsa. Hal ini menjadi perhatian utama bagi Pemerintahan Daerah Kabupaten Tulungagung dalam urgensinya untuk mengoptimalkan perlindungan anak.
--	--	--	---

1.5 Landasan Konseptual

1.5.1 Konsep Paradiplomasi

Istilah Paradiplomasi berasal dari kata *parallel diplomacy* yang berarti diplomasi sejajar. Istilah ini diperkenalkan oleh Ivo Duchacek pada tahun 1984, yang merujuk pada adanya aktivitas internasional langsung yang dilakukan aktor-aktor sub-nasional.²⁵ Duchacek kemudian mengklasifikasikan paradiplomasi kedalam tiga jenis yakni :

1. Transborder regional paradiplomacy. Jenis paradiplomasi ini merupakan kegiatan paradiplomasi yang umumnya merujuk pada hubungan institusional, informal yang diimplementasikan oleh aktor sub negara yang memiliki kedekatan secara geografis.
2. Transregional paradiplomacy. Hal ini terjadi apabila diplomasi dijalin oleh aktor sub negara yang kawasannya tak langsung berbatasan namun masih dalam kawasan yang sama.

²⁵ Duchacek, I. D. (1984). The international dimension of subnational self-government. *Publius: the journal of federalism*, 14(4), 5-31.

3. Global paradiplomacy. Jenis paradipmasi ini ialah melakukan interaksi politik yaitu diplomasi oleh antar aktor sub-negara dimana kedua aktor tersebut tak berada dalam wilayah yang sama, dalam hal ini ialah perbedaan benua.²⁶

Dalam pelaksanaannya, kerjasama paradiplomasi diklasifikasikan menjadi 4 bentuk kerjasama menurut PERMENDAGRI No.22 Tahun 2020 dan PERMENDAGRI No. 25 Tahun 2020 yaitu kerjasama dengan daerah lain (KSDD), kerjasama dengan pihak ketiga (KSDPK)²⁷, kerjasama dengan lembaga luar negeri (KSDLL), serta kerjasama dengan pemerintahan daerah luar negeri (KSDPL). Dalam penelitian ini, kerjasama yang dilakukan Pemerintahan Kabupaten Malang dengan USAID termasuk dalam KSDPL. Kerjasama Pemerinthan Kabupaten Malang bersama dengan USAID sebagai lembaga luar negeri ialah atas dasar kelanjutan kerja sama oleh Pemerintahan pusat untuk memposisikan daerah sebagai penerima manfaat.²⁸

Dalam pelaksanaan aktivitas paradiplomasi, pihak-pihak yang melakukan kerjasama tentunya telah menetapkan tujuan serta target yang ingin dicapai. Efektif atau tidaknya paradiplomasi bergantung pada tercapainya tujuan serta target yang telah ditetapkan. Istilah efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* dengan arti berhasil atas sesuatu yang telah direncanakan dan dilakukan dengan baik. Dalam kamus ilmiah populer, efektif didefinisikan sebagai ketepatan suatu

²⁶ Sulaiman, D. (2021). *Paradiplomasi Pemerintah Kota Bandung–Suwon (Korea Selatan) Melalui Kerjasama Sister City Dalam Bidang Pendidikan Dan Kebudayaan* (Doctoral dissertation, Universitas Komputer Indonesia).

²⁷ Januarifitra, R. D., & Kurniawati, D. E. (2022). Upaya Reduksi Stunting pada BADUTA 2.0 melalui Kerja Sama antara Global Alliance for Improved Nutrition (GAIN) Swiss dan Pemerintah Kabupaten Bondowoso. *Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton*, 8(2), 506-520.

²⁸ *ibid*

penggunaan, menjang tujuan atau hasil. Soewarno Handayani S. menyebutkan bahwa “Efektivitas ialah pengukuran dalam artian tercapainya tujuan yang sudah ditentukan sebelumnya.” Hal ini selaras pula dengan apa yang dikemukakan oleh Hidayat yang menggambarkan bahwa “Efektivitas merupakan suatu ukuran yang menyatakan sejauh apa target dalam hal ini kuantitas, waktu dan kualitas yang telah dicapai.

Semakin besar target yang terpenuhi, semakin tinggi efektivitasnya.²⁹ Dengan demikian, secara sederhana dapat disebut bahwa efektivitas merupakan kemampuan dalam mencapai tujuan serta hasil yang direncanakan melalui metode yang efisien dan tepat.

Dalam konteks paradiplomasi, pada artikel riset yang ditulis oleh Tjandradewi dan Marcotulio, disebutkan bahwa sedikitnya terdapat tiga unsur yang ditetapkan sebagai indikator efektifitas paradiplomasi, yaitu :

1. Pihak-pihak yang terlibat telah menetapkan komitmen untuk saling berhubungan. Hal ini dapat dilihat melalui adanya nota kesepahaman pada pihak-pihak terkait yang berisikan tujuan yang telah disepakati.
2. Terdapat implementasi dari nota kesepahaman yang telah disepakati, yang juga diikuti oleh partisipasi juga respon masyarakat, sejumlah komunitas serta stakeholder yang berkaitan di ruang ingkup daerah.
3. Adanya hasil nyata yang didapatkan dari upaya kerjasama yang dilakukan,

²⁹ Natika, L., & Nuraida, N. (2020). Efektivitas Tempat Pelelangan Ikan (Tpi) Terungtum Pada Dinas Perikanan Kabupaten Subang (Studi Kasus Di Kecamatan Pusakanagara). *The World of Public Administration Journal*.

yang tentunya sesuai dengan target yang ditetapkan³⁰.

Pada penelitian ini, ketiga unsur tersebut menjadi indikator tolak ukur keberhasilan upaya kerjasama yang dilakukan pemerintahan Kabupaten Malang dengan USAID dalam pemabangunan sanitasi dan air bersih.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif untuk menjelaskan efektifitas paradiplomasi Pemerintahan Kabupaten Malang dengan USAID dalam meningkatkan air bersih dan sanitasi. Penelitian ini berusaha menyajikan bentuk aktivitas paradiplomasi pemerintahan Kabupaten Malang dengan USAID yang telah berlangsung lama, hingga saat ini. Penggambaran yang berusaha direalisasikan telah melalui proses pemilihan, mengumpulkan serta mengklasifikasi fakta. Penulis menggunakan metode deskriptif ini guna mendeskripsikan sejauh apa tingkat efektivitas serta dampak yang dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Malang melalui kerjasama bersama dengan USAID dalam meningkat air bersih dan sanitasi.

1.6.2 Metode Analisa Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisa data kualitatif yakni metode penelitian menggunakan studi pustaka dan wawancara dalam menganalisa data. Sumber yang diperoleh merupakan sumber sekunder melalui

³⁰ Tjandradewi, B.I. dan P.J Marcotullio, "City-to-city networks: Asian Perspectives on key elements and areas for success", *Habitat International* 33 (2009): 165-172.

buku, jurnal, website resmi, serta laporan tahunan yang terakreditasi dan terpercaya. Dalam pelaksanaan penelitian ini, penulis berusaha mengumpulkan sejumlah informasi sebagai pendukung data yang akan penulis jabarkan dalam riset paradiplomasi pemerintahan Kabupaten Malang dengan USAID dalam peningkatan air bersih dan sanitasi.

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang dipergunakan dalam penelitian ini ialah pengumpulan studi pustaka yang kemudian dipaparkan secara kualitatif-deskriptif. Sumber data sekunder dan primer menjadi hal pendukung peneliti dalam meneliti hal ini. Teknik yang diterapkan dalam pengumpulan data kualitatif ini dilakukan dengan menggunakan aplikasi Harzing's Publish and Perish dengan menggunakan kata kunci Efektivitas Paradiplomasi. Penulis juga melakukan wawancara bersama dengan Bapak Ir Renung Rubiyatadji, MM. selaku kepala bidang di Dinas Lingkungan Hidup, Ibu Andiyah Anugrawati, Sub Kor. Evaluasi Kerja Sama Sekretariat Daerah Kabupaten Malang, Ibu Kurniadi Rachmawan, SST.Par., Sub Kor. Fasilitasi Kerja Sama dalam Negeri Sekretariat Daerah Kabupaten Malang, Bapak Roy Alfian Tandianto, SE, MSA. , Sub Kor. Fasilitasi Kerja sama dalam Luar Negeri Sekretariat Daerah Kabupaten Malang, Bapak Roy Rahardian selaku Pejabat Fungsional Perencana di Bappeda Kabupaten Malang, serta Bapak Alun selaku pihak terkait dari program USAID.

Setelah data dikumpulkan melalui aplikasi Harzing's Publish and Perish dan beberapa media jurnal lainnya, penulis telah menelaah dan

mengklasifikasi data. Data yang diperoleh dikategorikan melalui tahun terbit dan fokus kajian. Hasil dari penelitian memperlihatkan bahwa Kabupaten Malang sesungguhnya memiliki sumber air bersih yang terkelola dari beberapa wilayah di Kabupaten Malang yang kemudian dikelola oleh dinas pekerjaan umum dan sumber daya air yang membentuk Unit Pelaksana Teknis Sumber Daya Air (UPT SDA) serta Pemerintahan Kabupaten Malang telah melakukan beberapa kerjasama dengan USAID dari tahun-tahun sebelumnya.

1.6.4 Ruang Lingkup Penelitian

1.6.4.1 Batasan Materi

Batasan materi penulis dalam penelitian ini hanya akan berfokus dalam menganalisis efektivitas paradiplomasi pemerintahan Kabupaten Malang dengan USAID dalam peningkatan air bersih dan sanitasi. Penelitian ini akan dikaji menggunakan konsep paradiplomasi.

1.6.4.2 Batasan Waktu

Pemerintahan Kabupaten Malang telah melakukan kerjasama dengan USAID dalam peningkatan air bersih dan sanitasi sejak 2014 dan beberapa kembali menjalin kerjasama kembali pada tahun 2019, 2020 dan hingga 2023. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki batasan waktu pada tahun 2014 hingga 2023 untuk mengukur efektivitas terhadap kerjasama pemerintahan Kabupaten

Malang dengan USAID.

1.7 Argumen Pokok

Dalam upaya pembangunan sanitasi dan air bersih, pemerintah Kabupaten Malang melakukan paradiplomasi melalui kerja sama dengan USAID. USAID telah menjalankan beberapa bentuk kerjasama pada tahun-tahun sebelumnya dengan tujuan yang sama dalam program *Indonesia Urban Resilient Water, Sanitation, and Hygiene* (IWUASH). USAID telah mengimplementasikan program kerja dalam mencapai tujuan yang telah disepakati. Kerjasama ini didorong dengan pola pikir masyarakat yang terbuka dan ketersediaan air yang melimpah. Sejauh ini, penulis berargumen bahwa kerjasama ini efektif, melihat bagaimana program yang dijalankan dan dampak dari kerjasama ini, hal ini selaras dengan tiga indikator yang telah dijabarkan sebelumnya, yaitu adanya komitmen untuk saling bekerja sama yang dapat dilihat melalui adanya nota kesepahaman pada pihak-pihak terkait yang berisikan tujuan yang telah disepakati, terdapat implementasi dari nota kesepahaman yang telah disepakati, yang juga diikuti oleh partisipasi juga respon masyarakat, sejumlah komunitas serta *stakeholder* yang berkaitan di ruang ingkup daerah serta adanya hasil nyata yang didapatkan dari upaya kerjasama yang dilakukan, yang tentunya sesuai dengan target yang ditetapkan.

1.8 Sistematika Penulisan

Tabel 1.2 Sistematika Penulisan

BAB	JUDUL	ISI
-----	-------	-----

BAB I	PENDAHULUAN	<p>1.1 Latar Belakang</p> <p>1.2 Rumusan Masalah</p> <p>1.3 Tujuan</p> <p>1.4 Manfaat Penelitian</p> <p>1.4.1 Tujuan Penelitian</p> <p>1.4.2 Manfaat Penelitian</p> <p>1.4.2.1 Manfaat Akademis</p> <p>1.4.2.2 Manfaat Praktis</p> <p>1.4 Penelitian Terdahulu</p> <p>1.5 Landasan Konseptual</p> <p>1.5.1 Konsep Paradiplomasi</p> <p>1.6 Metode Penelitian</p> <p>1.6.1 Tipe Penelitian</p> <p>1.6.2 Metode Penelitian</p> <p>1.6.3 Teknik Pengumpulan Data</p> <p>1.6.4 Ruang lingkup Penelitian</p> <p>1.6.4.1 Batasan Materi</p> <p>1.6.4.2 Batasan Waktu</p> <p>1.7 Argumen Pokok</p> <p>1.8 Sistematika Penulisan</p>
BAB II	<p>PARADIPLOMASI PEMERINTAH KABUPATEN MALANG DALAM UPAYA PENINGKATAN SANITASI DAN AIR BERSIH MELALUI KERJASAMA DENGAN USAID</p>	<p>2.1 Kondisi lingkungan serta ketersediaan air bersih di Kabupaten Malang.</p> <p>2.2 Upaya paradiplomasi Kabupaten Malang dalam pembangunan sanitasi dan air bersih melalui kerja sama dengan USAID.</p>

BAB III	EFEKTIVITAS KERJA SAMA PEMERINTAH KABUPATEN MALANG DENGAN USAID DALAM UPAYA PENINGKATAN SANITASI DAN AIR BERSIH	3.1 Komitmen Kedua Pihak 3.2 Implementasi 3.3 Dampak 3.3.1 Aspek Perubahan Perilaku Masyarakat 3.3.2 Akses Air Bersih 3.3.3 Kesehatan Masyarakat
BAB IV	PENUTUP	4.1 Kesimpulan 4.2 Saran

